

**PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH JULIARI
BATUBARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL BAGI MASYARAKAT PADA MASA
PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun oleh
Karel Nehemia Hamonangan
1840050034

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH JULIARI
BATUBARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL BAGI MASYARAKAT PADA MASA
PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**Karel Nehemia
Hamonangan
1840050034**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

VISI DAN MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia:

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusional/internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karel Nehemia Hamonangan

NIM : 1840050034

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Juliari Batubara Dalam Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 27 Juli 2022



Karel Nehemia Hamonangan

NIM : 1840050034



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Karel Nehemia Hamonangan
NIM : 1840050034
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul : Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Juliari Batubara Dalam Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 27 Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes)
NIDN : 0420106503

Pembimbing II

(Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H)
NIDN : 8977220021

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)
NIDN: 0326116401

Pjs. Dekan

(Tomson Situmeang, S.H., M.H)
NIDN: 0325028101



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 27 Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Karel Nehemia Hamonangan
NIM : 1840050034
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "**Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Juliari Batubara dalam Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia**" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes	Ketua	
2. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H	Anggota	
3. Prof. Dr. Mompong L. Panggabean, S.H., M.H.	Anggota	

Jakarta, 27 Juli 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Karel Nehemia Hamonangan
NIM : 1840050034
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Juliari Batubara dalam Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundungan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 27 Juli 2022
Yang menyatakan



Karel Nehemia Hamonangan

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, saya ingin memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan saya kesehatan, kekuatan, semangat, kecerdasan dan kemampuan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Juliari Batubara Dalam Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia”** dengan tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir saya, sebagai mahasiswa fakultas hukum universitas kristen Indonesia di semester 7 ini, yang telah disampaikan oleh pihak kampus sebagai syarat kelulusan dari fakultas hukum universitas kristen Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Tuhan Yesus Kristus**, saya sangat berterimakasih kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan saya kesehatan, kekuatan, kecerdasan dan kemampuan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan di fakultas hukum uki dengan baik dan tepat waktu dan juga yang memampukan saya untuk dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
2. **Orang Tua**, saya sangat berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan semangat, yang selalu memberikan dedikasi yang tinggi dan hati yang memberi setiap saat kepada saya dalam hal pembayaran uang perkuliahan semester pertama sampai dengan tahapan pembuatan skripsi, yang selalu memperhatikan saya dalam hal kesehatan dengan memberikan

makanan yang bergizi dan aneka macam jus, sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya di fakultas hukum uki dengan nilai yang baik dan tepat waktu.

3. **Keluarga Simanjuntak, Panjaitan, Marpaung dan Panggabean**, saya sangat berterimakasih kepada segenap keluarga besar saya yang selalu mendoakan saya dalam segala hal dan yang selalu memberikan semangat, dukungan, kasih sayang dan perhatian yang tidak ada habisnya diberikan kepada penulis selama ini.
4. **Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
5. **Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.**, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Kristen Indonesia.
6. **Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H.**, selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. **Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. **Ibu Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH. Kes**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. **Ibu Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, semangat, yang juga memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

10. Bapak Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan pengarahan mengenai perbaikan sistematika penulisan skripsi saya pada saat berlangsungnya ujian sidang skripsi, demi terbentuknya sistematika penulisan skripsi yang baik, benar dan tepat.

11. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2018, yang telah memberikan semangat, canda tawa, suka dan duka yang mendalam.

Demikian, kata pengantar yang dapat penulis sampaikan. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membaca skripsi ini dan bagi semua pihak yang tertarik untuk menekuni bidang kajian ini. Penulis juga memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Terima kasih atas kesediaan dan perhatiannya

Jakarta, 27 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	7
1. Kerangka Teori	7
2. Kerangka Konsep	13
3. Pengertian Penyalahgunaan Kekuasaan atau Penyalahgunaan Wewenang	13
4. Pengertian Pejabat Pemerintahan	16
5. Pengertian Bantuan Sosial	16
6. Pengertian Pemberi dan Penerima Bantuan Sosial	16
7. Pengertian Korupsi	17
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A.Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	22

1. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tujuan Dibentuknya.....	25
2. Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial	27
B. Pengertian Mengenai Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Pelaku Penyelenggaraan Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial... 28	
C. Asas, Tujuan, Sasaran dan Kriteria Masalah Sosial yang Layak Mendapatkan Bantuan Dari Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	29
D. Kementerian Sosial Sebagai Pelayan Publik Wajib Melaksanakan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Bagian Dari Program yang Terdapat Di Lembaga Kementerian Sosial	30
E. Nilai-Nilai Kementerian Sosial Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian Sosial	33
F. Ruang Lingkup Pengaturan Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	35
G. Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan.....	36
H. Teori-Teori Pemidanaan.....	37
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)	37
2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)	39
3. Teori Gabungan/Modern (Verenigings Theorien)	41
4. Teori-Teori Tujuan Hukum	42
 BAB III UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP BANTUAN SOSIAL DIDALAM LEMBAGA KEMENTERIAN SOSIALREPUBLIK INDONESIA	46
A. Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan.....	46
1. Pengertian Kejahatan.	46
2. Keterbatasan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Hukum Pidana	47
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan.....	51
1. Teori Efektivitas Hukum.....	51
2. Teori Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	56
3. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).....	61

4.	Faktor Penegak Hukum Yakni Pihak yang Membentuk Maupun Menerapkan Hukum	63
5.	Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.....	65
6.	Faktor Masyarakat.....	66
7.	Faktor Kebudayaan (Cultural).....	68
BAB IV	PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA JULIARI BATUBARA PADA KASUS KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DALAM KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA SUDAH SESUAI DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN	78
A.	Pengertian Pemidanaan	78
B.	Filsafat Pemidanaan dan Teori-Teori Pemidanaan	80
1.	Teori Retributif.....	80
2.	Teori Deterrence (Teori Pencegahan)	81
3.	Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan).....	81
4.	Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat).....	81
5.	Teori Gabungan/Modern (Verenigings Theorien).....	86
C.	Tujuan Pemidanaan	87
BAB V	KESIMPULAN.....	96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

A. Nama Mahasiswa	:	Karel Nehemia Hamonangan
B. Nomor Induk Mahasiswa	:	1840050034
C. Judul Skripsi	:	Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Juliari Batubara Dalam Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia
D. Dosen Pembimbing	:	1. Dr. dr. Rospita Adelina Siregar MH. Kes 2. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.
E. Program Kekhususan	:	Hukum Administrasi Negara
E. Daftar Bacaan	:	Buku, Internet dan Jurnal Hukum
F. Kata Kunci	:	Penyalahgunaan Kekuasaan, Pejabat Pemerintah, Bansos
G. Halaman	:	97 halaman + Daftar Pustaka
H. Ringkasan Isi	:	

Pandemi covid 19 membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan yang ada di Indonesia bahkan di dunia, sehingga menyebabkan terjadinya 3 dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia, yaitu melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli; melemahnya bidang investasi dan berimplikasi terhadap berhentinya berbagai bidang usaha; pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan cepat, untuk dapat mengatasi dampak dari pandemi covid 19 di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Namun kebijakan pemerintah tersebut justru disalahgunakan oleh Juliari Batubara sebagai menteri sosial republik Indonesia, yang juga merupakan seorang pejabat pemerintah dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan meminta fee minimal 10% untuk satu paket sembako secara langsung kepada pemenang tender yang telah ditunjuknya langsung melalui tim khusus yang sudah terbentuk sebelumnya.

Kemudian kasus korupsi tersebut dibuktikan dari adanya pengakuan dari masyarakat serta fakta yang memperlihatkan bahwa paket sembako yang diberikan sangat tidak sesuai dan jauh dari kata layak dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebesar Rp270.000,00, yang dapat diketahui dan dilihat dari jenis kualitas yang rendah atau dibawah standar nasional Indonesia dan merek yang tidak pernah terdengar sebelumnya, seperti: susu, jenis beras yang berkutu dan sangat kusam, ayam yang berbau busuk dan jenis sarden kaleng yang berbau busuk dan juga tidak adanya ikan sarden di dalam kalengnya tersebut atau hanya kuahnya saja.

Yang kedua, BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (untuk selanjutnya disebut BPKP) menemukan adanya harga yang tidak wajar dalam paket bantuan sosial untuk masyarakat saat pandemi, yaitu sebesar Rp 65,88 Miliar, yang membuat adanya suatu indikasi kelebihan dalam pembayaran harga bahan pokok sembako. Kemudian, adanya selisih harga untuk transportasi di daerah Jakarta; Bogor; Depok; Tangerang dan Bekasi, sebesar Rp 2,97 Miliar dan kelebihan pembayaran dalam paket bantuan sosial,

sebesar Rp 6,09 Miliyar. Sehingga dari proses penghitungan menurut BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (untuk selanjutnya disebut BPKP), anggaran bantuan sosial diduga dikorupsi sebesar Rp 20,8 Miliyar.

Yang ketiga, kasus korupsi dana bantuan sosial yang terjadi di Indonesia, dikarenakan adanya pengurangan jumlah penerima bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat Indonesia yang terdampak oleh situasi kondisi pandemi covid 19, bahkan ada beberapa masyarakat Indonesia yang tidak menerima sama sekali dana bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial untuk disalurkan. Hal tersebut dapat terlihat dari tindakan pelaku yang membuat sebuah daftar nama penerima bantuan sosial secara rekayasa atau fiktif, agar pemerintah pusat tetap menyalurkan dana bantuan sosial tersebut.

Penulis,

Karel Nehemia Hamonangan

ABSTRACT

A. Name	:	Karel Nehemia Hamonangan
B. Student's Number Identity	:	1840050034
C. Title	:	<i>Abuse of Official Power Government (Legal Study of the Case of Providing Social Assistance to the Community During the Covid 19 Pandemic In Indonesia)</i>
D. Supervisor	:	1. Dr. dr. Rospita Adelina Siregar MH. Kes 2. Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.
E. Specificity Program	:	State administrative of law
F. Reading List	:	Book, Internet and Law Jurnal
G. Keywords	:	Abuse of Power, Official Government and Social Assistance
H. Number of Pages	:	97 pages + References
I. Summary of Contents	:	

The COVID-19 pandemic has had a major impact on various sectors of life in Indonesia and even in the world, causing 3 major impacts on the Indonesian economy, namely weakening household consumption or weakening purchasing power; weakening of the investment sector and the implications for the cessation of various business fields; economic downturn causing commodity prices to fall. The Indonesian government has taken quick action to overcome the impact of the COVID-19 pandemic in Indonesia, namely by issuing Presidential Regulation Number 82 of 2020 concerning the 2019 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) AND NATIONAL ECONOMIC RECOVERY Committee.

However, this government policy was misused by Juliari Batubara as the social minister of the republic of Indonesia, who is also a government official by committing a criminal act of corruption by asking for a minimum fee of 10% for one basic food package directly to the tender winner who had been appointed directly through a special team that had been appointed previously formed.

Then the corruption case was proven by the recognition from the public as well as the fact that the basic food packages provided were very inappropriate and far from worthy of the nominal set by the Indonesian government of Rp. 270,000.00, which can be identified and seen from the type of quality. which is low or below Indonesian national standards and brands that have never been heard before, such as: milk, a type of rice that is lice and very dull, chicken that smells rotten and a type of canned sardine that smells bad and also no sardines in the can or just just the gravy.

Second, the FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY (hereinafter referred to as BPKP) found that there was an unreasonable price in the social assistance package for the community during the pandemic, which was Rp. Then, there is a price difference for transportation in the Jakarta area; Bogor; Depok; Tangerang and Bekasi, amounting to Rp 2.97 billion and overpayment in social assistance packages, amounting to Rp 6.09 billion. So from the calculation process according to the FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY

(hereinafter referred to as BPKP), the social assistance budget is alleged to have been corrupted in the amount of Rp. 20.8 billion.

Third, the corruption case of social assistance funds that occurred in Indonesia, due to a reduction in the number of recipients of social assistance that should have been given to the Indonesian people who were affected by the situation of the COVID-19 pandemic, there were even some Indonesians who did not receive any social assistance funds that had been provided. provided by the Indonesian government through the ministry of social affairs for distribution. This can be seen from the actions of the perpetrators who made a list of recipients of social assistance in an engineering or fictitious manner, so that the central government continued to distribute the social assistance funds.

